

## TOPIK UTAMA

# RELASI STRUKTUR DAN AGEN DALAM GERAKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Ida Wiendijarti<sup>1</sup>, Hermin Indah Wahyuni<sup>2</sup>, Roso Witjaksono  
Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan  
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta  
Email: ida.wiendijarti@upnyk.ac.id

## ABSTRAK

Artikel ini dimaksudkan untuk memperoleh pemetaan yang komprehensif mengenai relasi struktur dan agen dalam Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pasca reformasi. Dalam iklim demokrasi saat ini, menarik untuk mengkaji bagaimana Gerakan PKK, sebagai dikoordinir oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa, untuk berperan sebagai agen pemberdayaan perempuan yang ideal. Argumen utama dari artikel ini adalah bahwa beberapa faktor, termasuk hirarki yang dalam, instruksi top-down, dan klientelisme yang memungkinkan PKK dieksploitasi untuk mendukung keberhasilan program pemerintahan tanpa kuasa untuk menolak atau menghindarinya, hal ini mengingat bahwa tim penggerak PKK merupakan bagian dari struktur pemerintahan. Pemetaan yang diperoleh diharapkan mampu menjadi referensi bagi revitalisasi PKK ke depan sehingga PKK mampu berperan sebagai agen pemberdayaan perempuan yang adaptif. Data untuk artikel ini dikumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, di PKK wilayah Kabupaten Sleman.

*Kata kunci: struktur, agen, organisasi, revitalisasi*

## PENDAHULUAN

Pada era demokrasi saat ini, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) masih eksis sebagai organisasi perempuan yang bekerja dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mulai dari tingkat keluarga, sampai tingkat propinsi bahkan tingkat pusat. Pada masa Orde Baru, PKK pernah digunakan sebagai alat politik dan sebagai sarana untuk mengawasi berlangsungnya ideologi pemerintahan (Suryakusuma, 2011) dan

dengan demikian memberikan dukungan yang signifikan pada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Di bawah rezim Orde Baru, Indonesia menggunakan organisasi negara korporatis untuk mengendalikan berbagai kelompok sosial, termasuk buruh dan petani. Perempuan, terutama yang di pedesaan daerah, dikooptasi melalui PKK (Reeve, 1985).

Di bawah Orde Baru berbagai program PKK diprioritaskan untuk menginformasikan dan dipengaruhi oleh target pembangunan oleh pemerintah yang Melalui Keputusan Menteri

Dalam Negeri No. SUS / 3/6/12, tanggal 27 Desember 1972, pemerintah mengubah nama PKK dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Perubahan nama ini dianggap mampu untuk mewakili hegemonisasi negara atas gerakan perempuan di Indonesia (Handayani, Parimarta, Sukesu & Andika, 2008) PKK secara resmi menjadi mitra strategis pemerintah dalam program pengembangannya melalui Lima Tahun ke empat Rencana Pembangunan (GBHN Pelita IV) diundangkan pada 1984 sebagai upaya untuk memastikan kesetiaan organisasi negara korporat.

Adanya perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia dan komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, berdampak pada perkembangan dan pelaksanaan operasional PKK. Tuntutan akan fleksibilitas PKK untuk menjadi agen pembangunan dan agen perubahan semakin kuat.. Kiprah PKK di lingkungan masyarakat merupakan salah satu ikon bergeraknya *civil society* dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan lebih terasakan efektivitasnya dengan adanya kader-kader yang menjangkau sampai di tingkat Desa/Kelurahan. Sampai saat ini PKK masih menjadi satu-satunya gerakan perempuan di Indonesia yang mampu

menerobos hingga ke tingkat desa dan kelurahan, karena PKK sangat dekat dengan birokrasi pemerintahan (Soetjipto & Adelina, 2013)

Kondisi yang terjadi nampaknya merupakan suatu realita dimana gerakan PKK yang diharapkan sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah, namun melalui peraturan yang ada tim penggerakannya merupakan struktur yang melekat pada birokrasi pemerintahan. Relasi yang terjalin antara struktur dan agen dalam kelembagaan PKK menjadi salah satu hal yang menarik dipetakan. Struktur diartikan sebagai serangkaian aturan dan sumber daya yang terbentuk dari, dan membentuk keterulangan praktik sosial. Struktur sebagai hasil (*outcome*) sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial yang merupakan letak keberadaan dualitas struktur (Priyono, 2002). Dalam lingkup ini, struktur yang dimaksudkan adalah stigma yang ada dalam masyarakat bahwa PKK merupakan organisasi masyarakat yang tidak produktif seperti organisasi masyarakat pada umumnya. Terdapat tiga dimensi struktural dalam sistem sosial, yaitu: signifikasi, dominasi dan legitimasi (Giddens, 2010) Berdasarkan penguatan ketiga unsur struktural tersebut, terjadi suatu proses pemberdayaan anggota PKK oleh pemerintah yang ditujukan untuk kemandirian masyarakat dan perempuan

khususnya dalam berbagai kegiatan produktif berupa kegiatan pelatihan yang pada akhirnya menjadi suatu praktik sosial.

Peneliti memilih Kabupaten Sleman, untuk melihat relasi struktur yang melekat pada aturan Gerakan PKK dengan agen dalam melaksanakan program-program PKK selama ini. Bagaimana dinamika agen dalam melihat aturan dan menerapkannya di masyarakat, sejauhmana produksi dan reproduksi aturan dilakukan, mengingat bahwa setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri dalam memaknai program-program PKK.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini melihat bagaimana anggota dan kader PKK dalam merespons berbagai program gerakan PKK selama ini. Untuk melihat respon ini, peneliti menggunakan konsep rutinisasi dan kesadaran yang ada dalam teori strukturasi. Kesadaran yang dibahas oleh Giddens mencakup motivasi tak sadar, kesadaran diskursif, serta kesadaran praktis. Dari ketiganya, kesadaran praktis-lah yang menjadi konsep dari strukturasi. Kesadaran ini merupakan pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa dijelaskan atau tidak mampu dirumuskan secara eksplisit oleh agen (Priyono, 2002). Kesadaran praktis menimbulkan praktik sosial yang terus menerus dilakukan tanpa jarang

mempertanyakannya kembali. Tindakan agen yang berdasar pada kesadaran ini biasanya akan menjadi rutinitas. Rutinitas merupakan salah satu konsep penting dalam teori strukturasi karena melekat pada kesadaran praktis, dimana rutinitas tidak dapat dipisahkan dari dengan kepribadian agen ketika agen beraktivitas sehari-hari dengan institusi-institusi masyarakat (Giddens, 2010).

Teori strukturasi menitik beratkan pada tiga konsep utama yaitu tentang “struktur”, “sistem”, dan “dualitas struktur” (Giddens, 2010), lebih khusus lagi dalam hubungannya antara agen (pelaku, aktor) dan struktur. Melalui teori strukturasinya Giddens menekankan kajian pada “praktik sosial yang tengah berlangsung” sebagaimana dinyatakannya, bahwa “ranah dasar studi ilmu-ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukanlah pengalaman aktor individu, ataupun eksistensi bentuk totalitas sosial apapun, melainkan praktik yang ditata di sepanjang ruang dan waktu” (Goodman, 2008). Strukturasi melihat pentingnya praktik sosial, baik dalam aksi maupun struktur kehidupan masyarakat. Strukturasi mengacu pada “suatu cara dimana struktur sosial (*social structure*) diproduksi, direproduksi, dan diubah di dalam dan melalui praktik”. Pengertian strukturasi dikaitkan dengan konsep dualitas struktur,

dimana struktur-struktur diproduksi dan direproduksi baik oleh tindakan-tindakan manusia maupun melalui me-dium tindakan sosial.

Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu ( (Giddens, 2010). Teori strukturasi memandang struktur itu sebagai “*rules and resources*” yakni tata aturan dan sumber daya, yang selalu diproduksi dan direporuksi, serta me-miliki hubungan dualitas dengan agensi, serta melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan sosial. Dalam teori strukturalisme struktur dipandang seba-gai suatu penciptaan pola relasi-relasi sosial atau fenomena-fenomena sosial serupa, sebagai kerangka atau morfologi sebuah organisme atau tiang penyangga sebuah bangunan, yang berada di luar tindakan manusia. Kritik Giddens kepada strukturalisme ialah, bahwa pandangan strukturalisme terutama strukturalisme-fungsional cenderung lebih tertuju pada “fungsi” daripada “struktur” dan meletak-kan struktur sebagai sesuatu yang berada di luar (Giddens, 2010).

Fokus yang pen-ting dari teori strukturasi adalah hubun-gan antara agensi dengan struktur (*agency and structure*), yakni

untuk menjelaskan dualitas dan hubungan dialektis antara agensi dengan struktur, dimana antara agensi dan struktur tidak dapat dipa-hami terpisah satu sama lain, keduanya merupakan dua sisi dari koin yang sama. Semua tindakan sosial melibatkan struk-tur, dan semua struktur melibatkan tinda-kan sosial. Menurut Giddens, aktivitas “tidak dilakukan oleh aktor sosial namun secara berkelanjutan diciptakan ulang melalui sarana yang mereka gunakan untuk mengekspresikan diri mereka sebagai aktor, baik di dalam ataupun melalui aktivitas-aktivitas mereka, agen menghasilkan sejumlah kondisi yang memungkinkan aktvitas-aktivitas ini” (Goodman, 2008).

Agen adalah aktor, sedangkan agensi merupakan peristiwa yang di dalamnya individu bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, dan peris-tiwa itu tidak akan terjadi jika saja indi-vidu tidak melakukan intervensi. Agen tidak mungkin ada tanpa kekuasaan, sedangkan aktor tidak lagi menjadi agen jika ia kehilangan kapasitas untuk menciptakan perbedaan. Teori strukturasi menempatkan kekuasaan pada aktor dan tindakan yang bertolak belakang dengan teori-teori yang cenderung men-gabaikan orientasi tersebut dan justru mementingkan niat aktor

(fenomenologi) atau struktur eksternal (fungsionalisme struktural)” (Goodman, 2008).

Gidden membedakan pengertian sistem dan struktur, dimana sistem adalah kelompok itu sendiri, termasuk juga perilaku yang dilaksanakannya, Sementara struktur adalah aturan-aturan yang mereka sepakati.. Penstrukturan (*strukturation*) dalam kelompok diseskripsikan sebagai ‘proses di mana sistem diproduksi dan direproduksi melalui pemakaian aturan dan sumber daya oleh anggota-anggota’ (Poole, M.S., Seibold, D.R., & McPhee, R.D., 1996). Strukturasi adalah produksi dan reproduksi sistem sosial melalui penggunaan aturan-aturan dan sumberdaya oleh anggota dalam interaksi. Interaksi dalam teori tersebut itu adalah tindakan yang didasarkan pada kehendak bebas. Sedangkan aturan adalah proposisi yang membuat keputusan bernilai atau menunjukkan bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan. Sementara sumberdaya adalah material-material, barang milik, dan karakter yang dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan kelompok atau anggotanya. Produksi terjadi ketika anggota kelompok menggunakan aturan-aturan dan sumberdaya dalam interaksi, sementara itu reproduksi terjadi ketika fitur penguatan tindakan dari sistem sudah ada di tempat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengikuti kaidah-kaidah penelitian kualitatif, yang mana merupakan penggalian interpretasi terhadap subyek. Terkait dengan realitas gerakan pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui PKK dan menganalisis dengan mengaitkan antara ketiga unsur tersebut, bagaimana pendapat mereka secara individu, kemudian dilihat keterlibatannya dalam kelompok, serta bagaimana pemahamannya terhadap dinamika dan kebijakan pemerintah dalam konteks aktivitasnya dalam Gerakan PKK. Penelitian ini menggunakan metode *intrinsic case study*, karena proses strukturasi dalam organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sesuatu yang menarik secara instrinsik dan perlu dipahami dan tidak digunakan untuk memfasilitasi pemahaman terhadap kasus-kasus lain.

Subyek yang menjadi responden adalah Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua kelompok kerja 1,2,3,4 Kabupaten Sleman, sekretarisat PKK Kabupaten Sleman, staf BAPEDDA Kabupaten Sleman, staf dinas perindustrian Kabupaten Sleman, dan anggota Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan dan kelurahan. Penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan *focus group discussion* dan dokumentasi. Teknik analisis

data dilakukan dengan model interaktif, dimana analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada awalnya PKK adalah kepanjangan dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, sampai pada tahun 1972 Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan himbauan untuk mengganti kepanjangan PKK menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Baru pada era reformasi kepanjangan PKK kembali diganti menjadi Gerakan Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga. Sejak awal, gerakan PKK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang diartikan sebagai sebuah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

Sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, Gerakan PKK memiliki serangkaian pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai landasan kerja, mengingat bahwa PKK adalah merupakan gerakan nasional yang dikoordinir oleh pemerintahan pusat. Adanya pedoman kelembagaan PKK dimaksudkan untuk mengantisipasi penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan pemerintah maupun kebijakan dalam Pemberdayaan dan

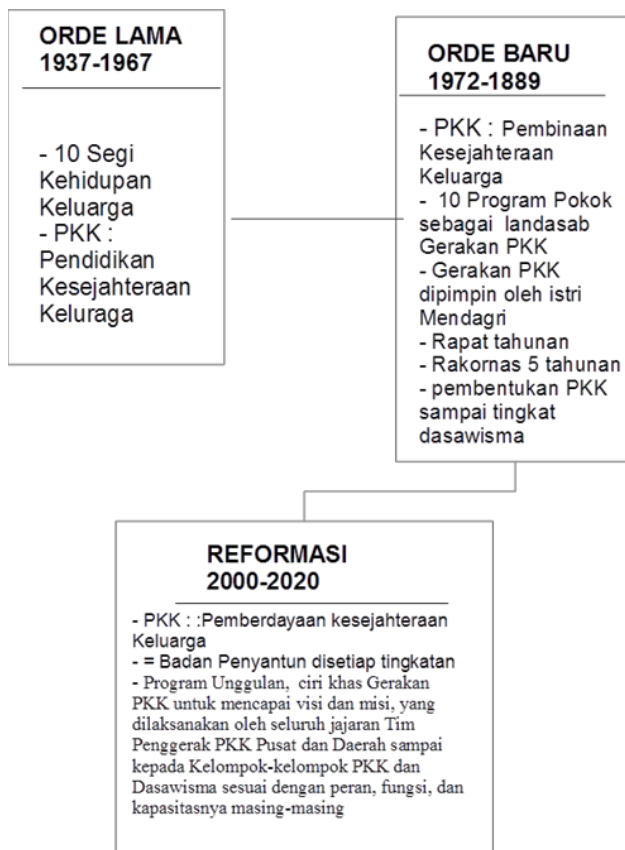
Kesejahteraan Keluarga (PKK). Untuk itu, program dan kegiatan Gerakan PKK, merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus menerus dilakukan dan ditingkatkan seirama dengan dinamika pembangunan.

Dalam rangka penataan dan peningkatan kualitas kinerja agar lebih profesional, maka Gerakan PKK setiap lima tahun sekali menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK. Keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam Rakernas tersebut merupakan kebijakan strategis terkait dengan perkembangan organisasi untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Hasil Rakernas tersebut sekaligus merupakan pedoman dan acuan bagi segenap kepengurusan PKK dari tingkat Pusat sampai ke Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional PKK.

Untuk saat ini sudah dilakukan sebanyak delapan Rakernas PKK, yang diawali sejak Rakernas PKK I tahun 1980 dan terakhir dilakukan adalah Rakernas VIII pada tahun 2015, yang merupakan tindak lanjut dari Rakernas PKK pada tanggal 28 s/d 30 Juli 2010 yang merupakan Rakernas PKK VII. Sebagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia Gerakan PKK memiliki landasan hukum yaitu; Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..

Perubahan aturan yang dihasilkan berdasarkan era pemerintahan, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

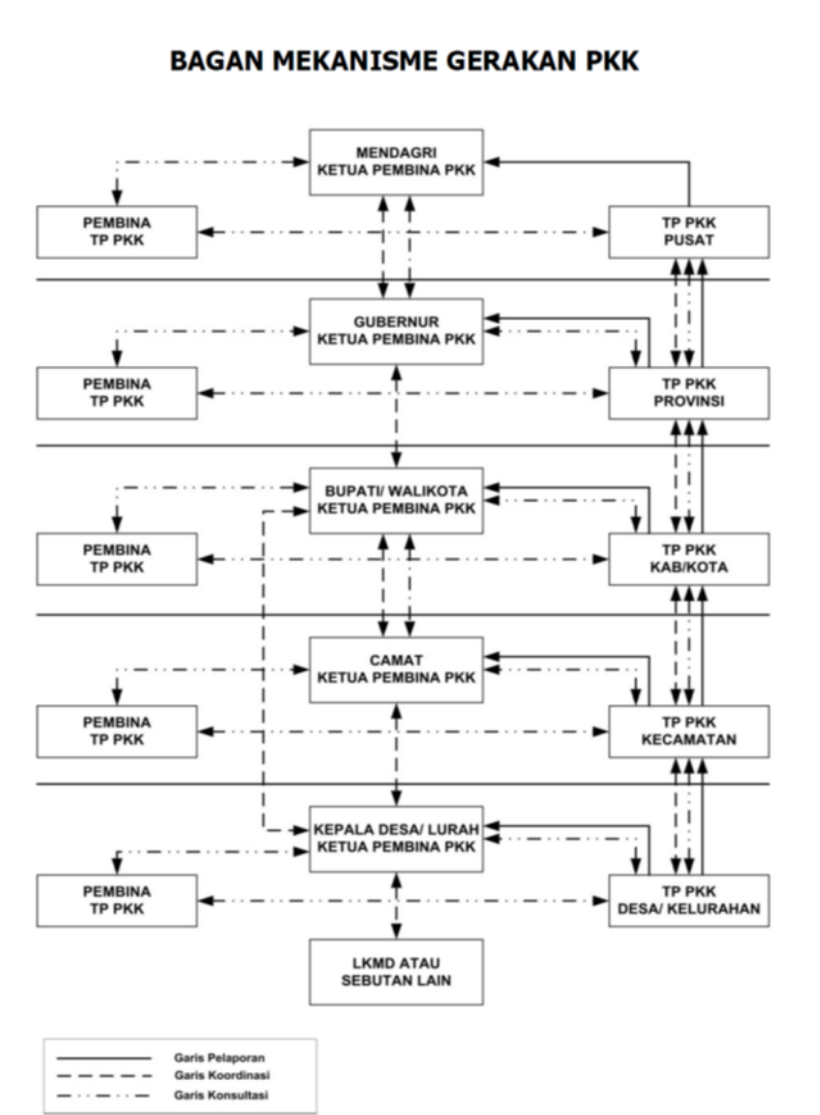


Bagan 1. Perubahan Kepanjangan PKK dari berbagai era pemerintahan

Hasil Rakernas VIII PKK sebagai Pedoman Gerakan PKK Tahun 2015-2020

merupakan dasar dari dilaksanakannya program-program gerakan PKK. Dimana hasilnya memutuskan adanya Program Unggulan yang menjadi prioritas dari Gerakan PKK, yaitu: a) Pola Asuh Anak dan Remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam Keluarga; b) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; c) Pemanfaatan lahan melalui Program Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK, d) Hidup Bersih Sehat di dalam Keluarga dan Lingkungan dengan PHBS dan perilaku Cerdik (cek kesehatan secara teratur, senyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stress).

Tim Penggerak PKK dibentuk di tingkat: pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. hubungan kerja antara tim penggerak PKK pusat dengan tim penggerak PKK provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis. Untuk mendekatkan jangkauan pembinaan kepada keluarga-keluarga dibentuk kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT sampai dengan kelompok dasawisma. Hubungan yang terjalin dalam pelaksanaan Gerakan PKK, diatur dalam Mekanisme Gerakan PKK



Bagan 2. Mekanisme Gerakan PKK

Berdasarkan alur mekanisme dan birokrasi dari Gerakan PKK, terlihat bahwa Tim Penggerak PKK desa yang dijabat oleh istri Kepala Desa wajib untuk melaporkan kegiatan dan melakukan konsultasi kepada Kepala Desa/Lurah, sedangkan hubungan dengan Pembina Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dimana Pembina TP PKK juga

melakukan koordinasi dengan Kepala desa terkait dengan masukan dan arahan terhadap Gerakan PKK tingkat Desa dan hubungan dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan selain pelaporan juga bersifat koordinasi dan konsultasi. Demikian juga untuk Tim Penggerak PKK Kecamatan, kabupaten, Propinsi dan Pusat terkait dengan mekanisme



gerakan PKK dalam hubungannya dengan Ketua Pembina PKK di semua jenjang birokrasi pemerintahn masing-masing. Selaku Ketua Pembina PKK Pusat adalah Menteri Dalam Negeri. Unsur Pembina TP PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri dalam Negeri, Gubernur, Bupati/walikota, Camat, dan kepala Desa/Lurah sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Realisasi dari pelaksanaan program-program unggulan melalui Gerakan PKK di masyarakat tentu saja tidak semudah yang dicanangkan, karena Tim Penggerak PKK dari berbagai tingkatan harus mampu menyesuaikan diri untuk mampu mewujudkan program-program tersebut di masyarakat. Seperti halnya program ‘Pola Asuh Anak Dan Remaja Dengan Penuh Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Keluarga’. Berbagai kondisi di lapangan bisa saja menjadi pendukung dan kendala dalam merealisasikan program tersebut. Program ini dibuat mengingat masih tingginya angka kenakalan remaja, anak putus sekolah, tawuran antar pelajar, dengan adanya program tersebut diharapkan bisa menurunkan

berbagai permasalahan yang menyangkut anak dan remaja. Kendala yang dihadapi antara lain kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan orangtua, lingkungan sosial dan sekolah, serta kurangnya dukungan dan kepedulian pemerintah dari pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Sedangkan yang mendukung antara lain mulai adanya kesadaran orangtua dalam pola pengasuhan anak terlihat dari keterlibatan orangtua dalam kegiatan komite di sekolah. Adanya berbagai kendala yang berbeda-beda tentu menuntut perlakuan yang berbeda juga, sehingga Tim Penggerak PKK memiliki cara yang berbeda-beda dalam merealisasikan program tersebut, bahkan bisa juga program tidak berjalan karena keterbatasan kemampuan Tim terhadap kendala yang dihadapi.

Berbagai kegiatan seperti sosialisasi sudah banyak dilakukan, namun karena kegiatan tersebut hanya bersifat sesaat, masyarakat kadang kurang mampu menyerap informasi dengan baik, demikian juga dengan kegiatan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pelatihan tanpa pendampingan nampaknya juga hanya mampu menjadikan masyarakat sekedar bisa namun tidak untuk menggerakkan mereka untuk berubah.

Gerakan PKK dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Hal ini merupakan tugas yang tidak mudah bagi Tim Penggerak PKK sebagai agen perubahan mengingat bahwa kondisi masyarakat sangat kompleks dan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan Tim Penggerak PKK terhadap program-program PKK. Secara umum Tim Penggerak PKK mengetahui terhadap 10 program pokok PKK, namun secara mendalam tentu tidak, sehingga Tim Penggerak terbagi dalam 4 kelompok kerja. Untuk itulah Tim Penggerak PKK berupaya melakukan interkasi antar pengurus sebagai upaya dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program-program PKK. Setiap kelompok kerja (POKJA) dalam Tim Penggerak PKK akan membuat perencanaan program di awal tahun dan menjadi fasilitator serta akan melakukan pelaporan pada akhir tahun.

Upaya yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK secara rutin dari membuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program setiap tahun adalah merupakan praktek sosial yang berulang-ulang dari

individu yang mereproduksi struktur tersebut melalui implementasi program-program PKK. Sebagai praktek sosial, perencanaan dan pelaksanaan program-program PKK melalui gerakan PKK yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK, adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana apabila dalam pelaksanaan ternyata ada kendala atau hambatan, maka akan dilakukan evaluasi apakah program akan dilanjutkan atau diganti dengan program yang lain, karena prinsip dalam pembuatan program adalah inovatif dan disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh wilayah masing-masing.

Dalam teori strukturasi menekankan bahwa praktek sosial yang berulang sebagai upaya untuk melihat suatu fenomena sosial. Agen dalam strukturasi adalah orang-orang yang konkrit dalam arus kontinu tindakan dalam peristiwa di dunia. Sedangkan struktur merupakan aturan dan sumberdaya yang digunakan agen dalam melakukan interaksi. Aturan adalah prosedur yang digeneralisasi dan cara yang dimiliki oleh agen reflektif dalam *stock of knowledge* yang secara implisit dan digunakan sebagai formula bagi tindakan dalam sistem sosial. Struktur juga melibatkan penggunaan sumberdaya yang terdiri dari peralatan material dan kapasitas

organisasional. Sifat dari struktur adalah mengatasi ruang dan waktu serta maya/virtual, sehingga bisa diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi

Strukturasi sebagai teori yang melihat aksi manusia sebagai sebuah proses produksi dan reproduksi bermacam-macam sistem sosial. Ketika seseorang berkomunikasi dengan yang lainnya, mereka membuat struktur sosial dari lingkup sosial luas ke yang lebih sempit yaitu relasi individu. Sebagai bagian dari tradisi struktural, strukturasi lebih fokus pada bagaimana proses berbagi makna dan interpretasi makna yang terkonstruksi dalam suatu jaringan dan implikasinya bagi kehidupan organisasi (Littlejohn, 2008).

Teori strukturasi menunjukkan bahwa agen manusia secara kontinyu mereproduksi struktur sosial – artinya individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosial. Struktur mengacu tidak hanya pada aturan-aturan yang disiratkan dalam produksi dan reproduksi sistem-sistem sosial namun juga pada sumberdaya-sumberdaya. (Giddens, 2010) berpandangan perubahan itu dapat terjadi bila agen dapat mengetahui gugus mana dari struktur yang bisa ia masuki dan dirubah, gugus tersebut antara lain gugus signifikansi, dominasi, dan legitimasi. Struktur penandaan atau signifikansi yang menyangkut sekamata

simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana. Struktur penguasaan atau dominasi yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang atau hal (ekonomi). Sedangkan struktur pembenaran (legitimasi) yang menyangkut skemata peraturan normative yang terungkap dalam tata hukum.

Sumber daya juga terdiri atas dua hal yakni sumber daya autoritatif dan sumber daya alokatif. Sumber daya autoritatif diturunkan dari koordinasi aktivitas agen. Sumber daya alokatif merupakan lingkaran control produk material atau tentang aspek dari dunia material (Giddens, 1984) Menurut teori strukturasi, saat agen memiliki kuasa untuk memproduksi tindakan juga berarti saat melakukan reproduksi dalam konteks menjalani kehidupan sosial sehari-hari.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Gerakan PKK merupakan hasil relasi antara struktur dan agen, dimana Tim Penggerak PKK secara kontinyu bertindak berdasarkan pada aturan dan kapasitasnya, dan menggunakan kekuasaan dan pengetahuan dalam menrealisasikan program-program PKK dalam berbagai kasus dan masalah-masalah di masyarakat

dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan

2. Peran sebagai tim penggerak PKK, memberikan otoritas normatif yang dapat dipakai sebagai dasar penguasaan kapasitas transformatif yang membuat mereka mengubah karakter sumber-sumber alokatif (seperti anggaran, personel dan fasilitas yang serba terbatas) yang semula dianggap tidak mungkin dilakukan menjadi sebaliknya, jadi mereka akan melaksanakan program dengan menyesuaikan pada kemampuannya dan kondisi di lapangan
3. Para Tim Penggerak PKK sebagai agen terus menerus menemukan terobosan selama aturan-aturan dan sumber-sumber otoritatif lainnya memberikan manfaat bagi kemungkinan untuk bertindak. Tim Penggerak PKK dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya berdasarkan aturan dasar PKK, memungkinkan agen mentransformasikan kekuasaan formalnya menjadi sebuah kapasitas yang relatif hampir tidak terbatas untuk menghasilkan tindakan-tindakan kreatif. Di sinilah memungkinkan proses-proses pemberdayaan terjadi karena Tim Penggerak PKK yang diketuai oleh istri kepala daerah dan anggota Tim yang mayoritas adalah perempuan memiliki

arena dalam pengambilan keputusan demi terlaksananya program-program Gerakan PKK

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih pada Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi yang telah memberikan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) bagi penulis untuk menempuh studi S3 di Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturalisasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goodman, G. R. (2008). *Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir, terjemahan Nurhadi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Handayani, Parimartha, Sukesi & Andika. (2008). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di kota Malang dalam perspektif kajian budaya. *E-Journal of Cultural Studies*, 2 (1), 1-14.
- Litlejohn, S. W. (2008). *Theories of Human Communication*. Belmont, CA: Wadworth.
- McPhee, R. &. (1996). *Organizational Communication: Traditional Themes and New Directions*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Priyono, H. B. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Reeve, D. (1985). *Golkar of Indonesia an Alternative to the Party System*. Singapore: Oxford University Press.
- Soetjipto & Adelina. (2013). *Suara Dari Desa: menuju Revitalisasi PKK*. Tangerang: Pusat Kajian Gender UI & Yayasan TIFA.
- Suryakusuma, J. (2011). *Ibuisme negara: Konstruksi sosial keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu.